



Kelompok Lansia Diminta Kembalikan Bansos



Kasus Bansos Sapta Bhuana

- Kelompok lansia di Banjar Sanding, Tampaksiring, tergabung dalam Sapta Bhuana mendapat bansos Rp 15 juta.
- Tapi, belakangan dana tersebut diminta dikembalikan. Ini tentu membuat bingung warga, apalagi dana tersebut sudah digunakan untuk membeli seragam olahraga.

- Selain itu, kelompok lansia tersebut merasa sakit hati dengan pemerintah karena seakan-akan mereka yang salah.
- Padahal, soal badan hukum sudah jelas tidak dimiliki kelompok tersebut.
- Warga berinisiatif untuk urunan mengembalikan dana bansos.

GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

Padahal Sudah Dibelian Seragam Olahraga

GIANYAR – Kelompok lanjut usia bernama Sapta Bhuana di Banjar Sanding, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, harus gigit jari. Hibah bantuan sosial (bansos) 2016 yang diterima oleh kelompok itu senilai Rp 15 juta harus dikembalikan lagi. Alasannya, kelompok itu belum memiliki badan hukum.

Perbekel Sanding Dewa Mahendra menyayangkan pengembalian tersebut. "Sangat disayangkan karena bansos ini sudah

Baju dan celana sudah dibeli pakai dana (bansos) itu. Tiba-tiba kami dapat surat dan disuruh mengembalikan."

DEWA MAHENDRA
Perbekel Sanding

cair, malah ditarik lagi. Kasihan para orang tua di desa kami. Seolah-olah orang tua kami yang salah," ujarnya, kemarin (15/1).

Yang lebih memprihatinkan lagi, kelompok lansia ini juga sudah mencairkan dana itu untuk dibelian seragam olahraga. "Baju dan celana sudah dibeli pakai dana (bansos) itu. Tiba-tiba kami dapat surat dan disuruh mengembalikan," terangnya.

Karena tidak mau menyakiti

perasaan kaum lansia yang sudah menggunakan dana itu sebagai seragam olahraga, maka warga yang muda-muda pun akhirnya urunan untuk mengembalikan dana itu ke kas daerah sesuai isi surat. "Dari pada para lansia sakit hati, kami urunan," terangnya.

Dan yang disayangkan oleh warga adalah tata cara pencairan bansos tersebut. "Waktu kami ingin cari bansos, disuruh mengoreksi sampai lima kali.

Edisi : Senin, 16 Januari 2017

Hal : 22



Bolak-balik ke pemda," beber-nya. Lanjut dia, apabila dari awal sudah dinyatakan salah, kenapa tidak langsung dicoret saja kelompok lansia ini.

"Kenapa setelah cair, malah ditarik lagi. Seharusnya saat proposal masuk sudah langsung dicoret atau ditolak," tandasnya. "Semestinya, ketika sudah tahu tidak bisa dicairkan, lebih baik dari awal bilang ini tidak bisa dicairkan," imbuhnya. Dia berharap kedepannya, pemda lebih teliti dalam mencairkan bansos. Apalagi bansos yang sudah terlanjut dinikmati oleh masyarakat. Pengembalian bansos oleh kelompok lansia tersebut ber-langsung melalui surat dari

Dinas Pendidikan Pemkab Gi-anyar pada 23 Desember 2016 lalu. Dalam surat itu, meminta kepada kelompok lansia Sapta Buana mengembalikan dana yang sudah cair.

Di bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahra-ga Gianyar (Sekarang Dinas Pen-didikan), Suradnya, menjelas-kan jika awalnya ada 7 kelompok yang diminta mengembalikan dana bansos. "Karena mereka tak bisa menunjukkan badan hukum," sebut dia. Akhirnya, dari 7 kelompok, ada 5 kelompok yang bisa menunjukkan badan hukum. "Jadi ada dua yang harus mengembalikan," tukas Suradn-ya. (dra/gup)

Edisi : Jenin, 11 Januari 2017

Hal : 22



KORUPSI UP ✓

Kejari Bangli Bidik Tersangka Baru

DENPASAR - Upah Pungut (UP) sektor pertambangan Kabupaten Bangli, tidak berhenti pada dua terdakwa AA Gede Alit Darmawan dan Bagus Rai Dharmayudha. Penyidik Kejari Bangli sudah mulai mengambil ancang-ancang membidik tersangka baru. Langkah itu diawali dengan memeriksa dua terdakwa Darmawan dan Bagus, yang kini mendekam di balik jeruji besi.

Sayangnya, Kejari Bangli terkesan tidak percaya diri menetapkan tersangka baru meski sudah memeriksa sejumlah saksi. Kuasa hukum Bagus, Made Suardika Adnyana, saat dikonfirmasi membenarkan jika kliennya sempat diperiksa. Dijelaskan Suardika, pemeriksaan Bagus dilakukan untuk pengembangan penyidikan.

"Klien kami dipanggil melalui surat resmi kejaksaan. Materi pemeriksaan masih terkait kasus korupsi UP Sektor Pertambangan Kabupaten Bangli," papar Suardika, kemarin (15/1).

Ditanya pemeriksaan Bagus apakah untuk tersangka baru, Suardika tidak menyangkal. Namun, pengacara asal Bangli itu mengaku belum tahu siapa calon tersangka yang dimaksud. Suardika menduga pemeriksaan Bagus untuk mengusut keterlibatan pihak lain. "Tapi kami belum tahu siapa tersangkanya itu. Klien saya hanya berusaha menjawab apa yang diketahui," imbuhnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani di sela-sela sidang di Pengadilan Tipikor, baru-baru ini tak membantah telah dilakukan penyelidikan. Namun hingga kini penyidik belum meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut Elan, pihaknya masih menunggu hasil persidangan terdakwa Bagus dan Dharmayuda. "Supaya penyidik punya keyakinan untuk mengungkap perkara ini, kami harus menunggu persidangan hingga selesai," papar Elan. (san/yor)

Edisi : Senin, 16 Januari 2017

Hal : 23



KASUS BANSOS

Dewan Nilai SKPD PHP

GIANYAR - Kasus penarikan dana bantuan sosial (bansos) terhadap para kelompok di Gianyar ternyata tidak saja terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (sekarang Dinas Pendidikan). Rupanya, beberapa SKPD juga asal-asalan menyalurkan bansos tanpa melihat aturan yang ada.

Ketua DPRD Gianyar Tagel Winarta menyatakan ada beberapa SKPD yang memberlakukan perbuatan yang memberatkan masyarakat di tingkat bawah itu. "Ada dari kelompok lansia, UKM, Peternakan, juga sudah cair, tapi malah dikembalikan lagi," ujar Tagel, menyayangkan, kemarin (16/1).

Dia pun telah mendapatkan laporan SKPD mana saja yang kembali menarik bansos yang sudah dinikmati oleh masyarakat itu. "Seperti di Sanding, bansos sudah dibelikan baju, malah diminta lagi," keluhnya. Tagel sendiri menilai, mengenai adanya penarikan uang bansos itu karena SKPD terkait yang mengurus masalah itu tidak paham mengenai aturan yang berlaku.

"Dikira tidak ada Perbup yang mengatur masalah itu," jelasnya. Setelah mengetahui adanya Perbup yang mewajibkan setiap penerima bansos memiliki badan hukum, baru SKPD ini kocar-kacir dan mendesak warganya mengembalikan lagi uang negara itu. "Memang kalau tidak dikembalikan bisa jadi temuan BPK," akunya. Hanya saja, yang membuatnya miris, ketika banyak masyarakat sudah berharap, bahkan ada yang bolak-balik mengurus bansos justru kena PHP (Pemberi Harapan Palsu). "Nah, ini dia kelemahan SKPD ada di sini," tukas dia.

Sebagai Ketua DPRD, dalam waktu dekat dia akan memanggil SKPD yang bekerja semauanya ini. Apalagi yang kena dan jadi korban adalah masyarakat. (dra/gup)

Edisi : Selasa, 17 Januari 2017

Hal : 22